

KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA

KOTA PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:

SARI RAMADHANIS

(2008 / 05718)

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

Pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2013

**Judul : Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar
Raya Kota Padang**

Nama : Sari Ramadhanis

NIM/BP : 05718/2008

Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi

Jurusan : Sosiologi

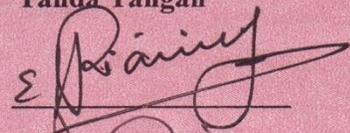
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2013

Dewan Penguji Skripsi

Tanda Tangan

Ketua : Erianjoni, S.Sos, M.Si



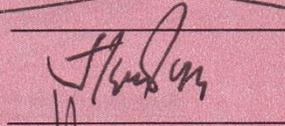
Sekretaris : Delmira Syafrini, S.Sos., M.A



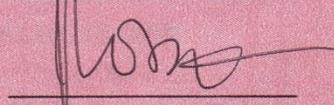
Anggota : Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si



Drs. Ikhwan, M.Si



Nora Susilawati, S.Sos., M.Si



ABSTRAK

Sari Ramadhanis. 05718/2008. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang. Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2013.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya, termasuk di Kota Padang. Namun keberadaan PKL menimbulkan berbagai persoalan karena mereka memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang, sehubungan dengan itu Pemko beserta Dinas Pasar Kota Padang mengeluarkan Peraturan Kota mengenai PKL. Peraturan tersebut justru mengakibatkan perlawanan oleh PKL dalam bentuk pelanggaran, sehingga mereka mengalami masalah dalam melakukan kegiatan dalam berdagang. Selain itu, mereka juga dihadapkan kepada masalah lain seperti pungutan liar dan penggusuran di pasar akibat keberadaan mereka yang menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Masalah yang dihadapi PKL tersebut tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap berdagang, PKL masih tetap mempertahankan keberadaan mereka di tengah masalah yang mereka hadapi, oleh sebab itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan PKL mempertahankan keberadaannya.

Teori untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman. Ada dua unsur yang terdapat di dalam teori ini yaitu aktor dan sumber daya. Aktor dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima, serta sumber dayanya adalah area parkir di kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke simpang Bioskop Mulia (arah ke Permindo) yang menarik perhatian PKL dalam hal posisi berdagang yang strategis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus instrinsik. Informan penelitian berjumlah 35 orang. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipan dan wawancara mendalam. Peneliti melakukan triangulasi data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Mathew Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab PKL mempertahankan keberadaan mereka di Pasar Raya Kota Padang yakni: (1) Ada Oknum yang Sengaja Memanfaatkan Keberadaan PKL; (2) Persepsi PKL terhadap Beo yang Mereka Bayar Setiap Hari kepada Dinas Pasar; (3) Keterlibatan dan Dukungan Partai Politik; (4) Adanya Relokasi yang Tidak Dikehendaki PKL; (5) Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai PKL yang Tidak Berpihak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Erianjoni, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Delmira Syafrini, S. Sos, M A sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial UNP yang telah memberikan kemudahan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.

Terima kasih kepada orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan do`a, moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta orang-orang terdekat yang telah memberikan dorongan semangat dalam perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Sosiologi, khususnya angkatan 2008 yang telah banyak memberikan semangat

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semua pihak yang dengan sukarela memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun buku-buku yang relevan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun dari segenap pembaca. Atas kritikan dan saran dari pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Semoga semua yang telah dilakukan menjadi ibadah dan diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya Program Studi Sosiologi Antropologi.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penjelasan Konsep	12
1. Definisi Konsep.....	12
a. Keberadaan.....	12
b. Pedagang Kaki Lima.....	12
G. Metode Penelitian	13
1. Lokasi Penelitian	13
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	13
3. Pemilihan Informan Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
a. Observasi.....	15
b. Wawancara.....	16
c. Studi Pustaka dan Dokumentasi.....	18
5. Triangulasi Data	18
6. Teknik Analisa Data.....	20
a. Reduksi Data	20
b. <i>Display</i> data atau Penyajian Data	21
c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan	21

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pasar Raya Kota Padang	23
1. Sejarah Berdirinya Pasar Raya Kota Padang	23
2. Gambaran Umum Pasar Raya Kota Padang	25
3. Pengelolaan Pasar Raya Kota Padang	26
a. Tugas Pokok Dinas Pasar	27
b. Fungsi Dinas Pasar	27
c. Wewenang Dinas Pasar	28
d. Kebijakan Dinas Pasar terhadap PKL	30
B. Lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang	33

BAB III KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA

KOTA PADANG

A. Ada Oknum yang Sengaja Memanfaatkan Keberadaan PKL	36
B. Persepsi PKL terhadap Beo yang Mereka Bayar Setiap Hari kepada Dinas Pasar	39
C. Keterlibatan dan Dukungan Partai Politik	42
D. Adanya Relokasi yang Tidak Dikehendaki PKL	45
E. Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai PKL yang Tidak Berpihak	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan kota (*rapid urban growth*) yang tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja telah mengakibatkan kota-kota menghadapi ragam problema sosial yang tidak dapat disangkal. Hal ini menjadi ciri umum di kebanyakan perkotaan negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang sedang dalam proses modernisasi.

Dalam masyarakat yang pertumbuhan ekonomi negaranya menganut rezim ekonomi kapitalistik dan developmentalism sebagai garda depan ideologinya terdapat kesenjangan antara pasaran kerja dengan pertumbuhan pencari kerja, kenyataan tersebut terjadi hampir disebagian besar masyarakat perkotaan. Ini merupakan akibat dari arus mobilitas kerja dan pekerjaan serta tuntutan prasyarat lain dari modernisasi itu sendiri. Demikian pula lahirnya pembedaan sektor formal dan informal dalam perkembangan struktur ekonomi urban tidak terlepas dari kenyataan pembangunan dan modernisasi yang berlangsung. Sektor ekonomi formal perkotaan ternyata tidak mampu menyerap seluruh penambahan angkatan kerja, sehingga kegiatan sektor ekonomi informal menjadi pelimpahan yang lazim

terjadi di perkotaan¹. Keberadaan sektor informal tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan. Sektor informal adalah sektor yang paling mudah dimasuki oleh masyarakat yang tidak mendapat kesempatan untuk bekerja disektor formal, sehingga kehadiran pelaku sektor informal di pusat keramaian kota seakan tidak terelakkan.

Dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran mereka tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial budaya². Bagi kalangan kelas bawah dan menengah, keberadaan PKL sangat dibutuhkan. Hubungan saling membutuhkan inilah yang semakin menyuburkan keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang. Implikasi dari kehadiran PKL tersebut muncul masalah kerawanan ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Permasalahan lain adalah cara pemerintah menyikapi aktivitas mereka, dimana pejabat kota menganggap PKL sebagai gangguan yang membuat kota jadi kotor dan tidak rapi, mengganggu pejalan kaki, pembuangan sampah yang tidak bersih, dan saingan toko yang tetap membayar pajak³.

PKL sebagai pelaku usaha kecil harus terakomodir dalam pembangunan kota, kota bukan hanya sebagai tempat pemodal besar kaum kapitalis tapi juga ruang mencari hidup bagi mereka pedagang kecil. Untuk itu, PKL sebagai komunitas hulu dari sebuah industrialisasi juga harus patuh dan taat aturan. PKL

¹ Mustafa, ali.2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. hal 1-2

² Mustafa, ali.2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. hal 9

³ Manning, Chris & Tajjudin, Noer Efendi. 1987. *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di kota*. Jakarta: PT. Gramedia. Hal 214

harus siap ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan pemerintah. Realitasnya PKL di Pasar Raya Kota Padang justru sering melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintahan kota (Pemko) dan Dinas Pasar. Selain itu para PKL sudah disediakan tempat khusus untuk berdagang yaitu di Pasar Raya Inpres yang baru dibangun berada tepat belakang Balai Kota Padang, mereka ditempatkan pada lantai 3 dan 4 tetapi para PKL masih tidak mau menempati dan masih berjualan di kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia), Pasar Raya Kota Padang yang merupakan area parkir⁴.

Sejak terjadi gempa pada 30 September 2009 yang merusak infrastruktur yang ada di Pasar Raya Kota Padang mengakibatkan jumlah PKL semakin hari kian bertambah, sementara tempat atau lokasi untuk berdagang tidak lagi sesuai dengan jumlah PKL. Berdasarkan penuturan Bapak Tuswen Said, B. Ac⁵, jumlah PKL secara keseluruhan pada tahun 2013 di Pasar Raya Kota Padang mencapai 2030 PKL, 450 PKL diantaranya menggelar barang dagangannya di kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia)⁶.

Sementara itu, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang pasca gempa 30 September 2009, Pemko sepakat untuk merencanakan dan melaksanakan penataan dan pengaturan terhadap PKL sesuai dengan ruang yang tersedia dan memperhatikan estetika pasar (sirkulasi udara, barang, orang,

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Trantib Dinas Pasar Kota Padang (tanggal 18 Februari 2013)

⁵ Wawancara dengan staff dinas pasar pada tanggal 18 februari 2013

⁶ Data dari Dinas Pasar Berdasarkan Ketetapan Target Penerimaan Retribusi Harian Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2013

keindahan dan kebersihan) bersama pedagang, dengan cara menata kembali tempat berjualan sekarang ini sesuai dengan jumlah PKL yang ada saat ini di Pasar Raya Padang. Pemko Padang mengeluarkan Peraturan kota yang berisi tentang pengaturan PKL. Demi kebijakan bersama maka Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang mengeluarkan peraturan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang, demi kelancaran arus lalu lintas dan tersedianya lokasi kondusif, aturan tersebut diantaranya adalah :

(1) Tidak dibenarkan menggelar barang dagangannya melewati garis batas yang telah ditentukan. (2) PKL mulai menggelar barang dagangannya dari pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. (3) Setelah berjualan tidak dibenarkan meninggalkan barang dagangan, lapak-lapak, meja, kursi, terpal pada jalan, trotoar, selasar (teras) toko dan gang-gang pertokoan. (4) Lahan parkir diperuntukkan untuk parkir kendaraan, tidak boleh dialihkan fungsikan untuk PKL sebelum pukul 17.30 WIB. (5) Untuk lokasi parkir bendi ditempatkan di jalan Sandang Pangan dan tidak dibenarkan di jalan Pasar Raya. (6) Apabila poin satu 1 sampai 4 tidak diindahkan maka bagi pedagang akan dilakukan penyitaan barang dagangannya dan untuk juru parkir dibatalkan kontrak kerjanya melalui dinas perhubungan⁷.

Dengan adanya peraturan di atas Pemko berharap keberadaan PKL bisa tertata, tetapi realitasnya PKL di Pasar Raya Kota Padang jauh dari yang diharapkan. Peraturan untuk penataan pasar justru mengakibatkan pasar semakin tidak tertata, disebabkan keberadaan PKL yang tidak jelas sehingga banyak PKL yang menggelar barang dagangannya di area parkir kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah Jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia).

Tindakan yang dilakukan PKL tidak lepas dari bentuk protes mereka terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang. Menurut PKL peraturan tersebut tidak adil bagi mereka, karena terlalu

⁷ Surat Peringatan dari Dinas Pasar Kota Padang Nomor : 511.2.1295.1X / PS.2012 mengenai Penetapan dan pengaturan PKL

mempersempit ruang lingkup PKL dalam berdagang. PKL juga menyatakan bahwa banyak permasalahan bagi mereka yang justru timbul akibat peraturan yang sudah ditetapkan tersebut yaitu : pertama, mengenai ketersediaan tempat atau lokasi yang tidak sesuai dengan jumlah PKL di kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah Jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia) yang mencapai 450 pedagang, mengakibatkan PKL di Pasar Raya Kota Padang berdagang hingga melampaui garis batas yang telah disepakati oleh dan PKL dan Pemko Padang. Kedua, PKL merasa ditekan dengan adanya jadwal berdagang yang baru boleh dilaksanakan mulai pukul 17.30 WIB sampai pukul 24.00 WIB. Menurut PKL jadwal tersebut tidak sesuai dengan kondisi Pasar Raya Kota Padang yang justru ramai pada pukul 10.00 WIB sampai menjelang Maghrib, yakni pukul 18.30 WIB⁸ dan sepi pembeli pada waktu yang telah ditentukan oleh Pemko dan dinas pasar tersebut.

Selain masalah tempat dan jadwal tersebut, PKL juga dihadapkan pada permasalahan pungutan liar yang terjadi serta penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan dinas pasar, ditambah lagi biaya retribusi yang harus dibayar kepada anggota dinas pasar setiap hari dengan jumlah melebihi ketentuan dari dinas pasar⁹. Padahal retribusi yang resmi dari Dinas Pasar hanya dipungut sekali dalam sehari yakni Rp 1.000,- per 1x1,5 meter persegi¹⁰ serta menggunakan karcis¹¹.

Kondisi di atas membuat kehidupan PKL di Pasar Raya Kota Padang semakin rumit karena status mereka yang tidak jelas, di samping itu mereka

⁸ Wawancara dengan PKL pada tanggal 18 Februari 2013

⁹ Observasi awal yang dilakukan peneliti

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Taswen Said, 18 Februari 2013

¹¹ Karcis adalah secarik kertas kecil sebagai bukti suatu pembayaran

mengalami berbagai macam masalah dalam melaksanakan kegiatan berdagang mereka, sulitnya mengurus surat izin usaha juga dialami oleh PKL di Pasar Raya Kota Padang, hal tersebut disebabkan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. PKL juga selalu dibayang-bayangi biaya yang mahal serta urusan yang lama dan berbelit-belit dalam mengurus izin usaha mereka¹².

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai PKL di Pasar Raya Kota Padang adalah skripsi dari Selvi Rahayu Putri dengan judul “Resistensi PKL terhadap penertiban oleh Satpol PP (studi: PKL di Pasar Raya Barat Padang)”. Skripsi dari Selvi Rahayu Putri menjelaskan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan PKL terhadap penertiban oleh Satpol PP, yaitu resistensi kuat dan resistensi lemah. Resistensi kuat seperti menggunakan kekerasan, mengintimidasi petugas dengan senjata tajam, dan melakukan demonstrasi, sedangkan resistensi lemah seperti main kucing-kucingan dengan petugas dan menebus barang dagangan yang telah disita serta mencari tempat yang sedikit tersembunyi untuk berjualan kembali.

Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dalam memfokuskan permasalahan PKL. Skripsi Selvi Rahayu Putri mengungkap bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan PKL terhadap penertiban oleh Satpol PP, sedangkan dalam skripsi ini yang akan diungkap adalah alasan PKL mempertahankan keberadaannya di tengah masalah yang mereka hadapi dalam

¹² Wawancara dengan PKL pada tanggal 13 mei 2013

berdagang di Pasar Raya Kota Padang. Selain itu juga terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang PKL di Pasar Raya Kota Padang.

Berdasarkan realita yang tampak, PKL di Pasar Raya Kota Padang tidak memiliki kejelasan status bahwa keberadaan mereka masih illegal atau sudah dilegalkan oleh dinas pasar. Hal ini terjadi karena PKL di Pasar Raya mengalami masalah dalam berdagang, namun mereka masih berusaha untuk tetap bertahan di Pasar Raya Kota Padang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Penelitian mengenai PKL sebelumnya sudah banyak yang dilakukan, namun dalam kesempatan ini, penulis lebih memfokuskan penelitian kepada keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang.

Keberadaan PKL yang berada di kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia) Pasar Raya Kota Padang dianggap menjadi penyebab ketidaktertiban pasar, karena para PKL menggelar barang dagangan mereka di kawasan parkir atau tempat sarana umum yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk berjualan. Adanya penertiban yang dilakukan oleh aparat terkait yaitu Satpol PP dan Dinas Pasar tidak membuat para PKL jera untuk tetap berdagang di kawasan tersebut. Mereka justru masih tetap

mempertahankan keberadaannya di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi selama berdagang di pasar.

Sehubungan dengan itu Pemko beserta Dinas Pasar Kota Padang mengeluarkan Peraturan Kota yang berisi tentang pengaturan mengenai lokasi, jadwal serta syarat bagi para PKL dengan harapan terbangunnya toleransi antara PKL dengan pengguna jalan, namun tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Peraturan untuk penataan pasar justru mengakibatkan perlawanan oleh PKL dalam bentuk pelanggaran, sehingga mereka mengalami masalah dalam melakukan kegiatan dalam berdagang. Selain masalah Peraturan Kota mengenai PKL, mereka juga dihadapkan kepada masalah lain seperti pungutan liar dan pengusuran di pasar akibat keberadaan mereka yang menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Rumitnya mengurus surat izin usaha juga dialami oleh PKL di Pasar Raya Kota Padang, hal tersebut disebabkan karena informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dengan jelas dan PKL dibayang-bayangi biaya yang mahal serta urusan yang lama dan berbelit-belit. Masalah yang dihadapi PKL tersebut tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap berdagang, justru PKL masih tetap betahan ditengah masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah *apakah yang menyebabkan PKL mempertahankan keberadaannya di tengah permasalahan yang mereka hadapi di Pasar Raya Kota Padang?*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab PKL mempertahankan keberadaannya di tengah permasalahan yang mereka hadapi di Pasar Raya Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: pertama, untuk menghasilkan tulisan ilmiah tentang alasan PKL mempertahankan keberadaannya di tengah masalah yang mereka hadapi di Pasar Raya Kota Padang. Kedua, dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji dan melakukan penelitian yang sama. Secara praktis penelitian ini dapat mengungkap alasan PKL mempertahankan keberadaannya di tengah permasalahan yang mereka hadapi di Pasar Raya Kota Padang.

E. Kerangka Teori

Penulis akan menganalisis data dengan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman dalam mengkaji keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang. Teori pilihan rasional Coleman mempunyai gagasan dasar bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan.

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara

rinci menuju ke tingkat sistem sosial. Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka¹³.

Pemusatan perhatian Coleman pada tindakan rasional individu dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Coleman juga memperhatikan hubungan makro ke mikro atau bagaimana cara sistem memaksa orientasi aktor. Akhirnya ia memusatkan perhatiannya pada aspek hubungan mikro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain.

Coleman juga menerangkan serentetan fenomena tingkat makro dengan menggunakan pendekatan pilihan rasionalnya. Dasar pendirian adalah bahwa teoritis perlu memelihara gambaran mereka mengenai aktor terus-menerus dan dari gambaran fenomena mikro ini muncul berbagai kesan mengenai fenomena tingkat makro. Dengan cara ini, perbedaan dalam fenomena makro dapat dirunut

¹³ Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 394-395

pada perbedaan struktur hubungan ditingkat makro dan bukan pada perbedaan ditingkat mikro.

Satu langkah kunci gerakan dari mikro ke makro adalah mengakui wewenang dan hak yang dimiliki oleh seorang individu terhadap individu lain. Tindakan ini cenderung menyebabkan subordinasi seorang aktor terhadap aktor lain. Lebih penting lagi, pengakuan ini menciptakan fenomena makro paling mendasar yakni satu unit tindakan yang terdiri dari dua orang ketimbang dua orang aktor yang bebas.

Aktor pada penelitian yang dilakukan adalah PKL yang menggunakan area di kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia) sebagai tempat berdagang. Hal tersebut dilakukan PKL mereka merasa bahwa area tersebut merupakan tempat yang strategis untuk berdagang. Mereka berupaya mencapai keuntungan maksimal, dan tujuan mungkin meliputi penilaian gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama yaitu mencari nafkah dan apa yang telah dicapai pada peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai yakni mencari kekayaan.

Aktor individual (PKL), biasanya akan merasakan tindakannya diawasi oleh aturan. Sehingga PKL membatasi rentetan tindakan yang boleh dilakukannya dengan dilaksanakannya aturan yang meliputi norma dan hukum. Hambatan kelembagaan ini menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif yang

membantu mendorong PKL untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindarkan tindakan yang lain.

F. Penjelasan Konsep

a. Keberadaan

Keberadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana PKL mampu mempertahankan posisi mereka di Pasar Raya Kota Padang. Meskipun PKL selalu mendapat masalah dalam berdagang di Pasar Raya Kota Padang.

b. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah orang/perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun yang tidak, yang menggunakan sebagian/seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan¹⁴. Pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata banyak kota atau negara yang sedang berkembang pada umumnya. Pedagang kaki lima digambarkan sebagai wiraswasta yang independen dan merupakan bagian terbesar dari mereka adalah pekerja yang tidak digaji. Keberhasilannya sangat tergantung pada usaha dan kemampuan menarik pembeli. Pedagang kaki lima sebagai kelompok yang melayani kebutuhan masyarakat di sekitar dengan melakukan niaga, dalam arti menyalurkan

¹⁴ Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman pedagang kaki lima

atau menghubungkan mata rantai antara produsen dan konsumen bagi barang dan jasa yang dijual kepada orang-orang yang membutuhkan.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Raya Kota Padang tepatnya di area parkir Pasar Raya Padang yaitu di sebelah Timur berbatasan dengan Simpang Bioskop Mulia (arah ke Permindo), di sebelah Barat berbatasan dengan Tugu Bundaran Air Mancur, di sebelah Utara berbatasan dengan bangunan sentral pasar raya, di sebelah Selatan berbatasan dengan bekas *Matahari Departement store*. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena di kawasan ini terdapat sekitar 450 PKL yang tetap mempertahankan keberadaannya di tengah permasalahan yang mereka hadapi dalam melakukan kegiatan berdagangnya.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena peneliti berasumsi dengan memakai pendekatan ini dapat mendeskripsikan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh, mengenai keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kondisi yang terjadi dan data-data dengan semaksimal mungkin.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik merupakan studi yang dilakukan karena ingin

mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus khusus yaitu tentang “keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang”. Pemilihan judul bukan karena mewakili kasus lain tetapi karena dengan segala kekhususannya kasus ini memang menarik sehingga pendekatan ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam situasi-situasi tertentu dan tepat untuk menemukan fakta yang ada dilapangan.

3. Pemilihan Informan Penelitian

Menurut Spradley informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau kejadian. Pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan maksud para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti¹⁵. Dengan kata lain peneliti menentukan informan secara berubah-ubah dengan asumsi informan yang diambil sesuai dengan kriteria yang terlibat secara langsung dalam keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah PKL yang sudah 4 tahun lebih berjualan di Pasar Raya Kota Padang, pihak Dinas Pasar dan Anggota IPKL yang aktif dalam kegiatannya, sehingga mengetahui lebih

¹⁵ Afrizal. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Labor Sosiologi. FISIP UNAND

banyak tentang masalah eksistensi PKL di Pasar Raya Kota Padang. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah (1) Staff dan karyawan Dinas Pasar Kota Padang, (2) PKL Pasar Raya, (3) Anggota IPKL yang aktif serta masyarakat yang berada dan berbelanja di Pasar Raya Kota Padang. Jumlah informan yang diwawancarai berjumlah 35 Orang (lihat di lampiran 1).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi tentang dunia sekitar. Observasi yang dipakai adalah observasi partisipan yang merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain dari panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.¹⁶

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam hal ini peneliti datang ke tempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik observasi ini digunakan untuk pengamatan dan berperan serta karena peneliti memberitahukan identitas sebagai peneliti kepada objek dan sasarannya.

Pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Padang sebenarnya sudah sering peneliti perhatikan, peneliti melihat aktivitas yang dilakukan

¹⁶ Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta; Penerbit Kencana Prenada Media

oleh para PKL yang membuka lapak dagangannya di kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia) Pasar Raya Kota Padang. Kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Raya Kota Padang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan status keberadaan yang jelas.

Pada saat penelitian yang dirasakan oleh peneliti begitu banyak mulai dari fakta baru yaitu ada pengakuan baru yang ditemukan oleh peneliti dari para pedagang maupun dari petugas dinas pasar, hal ini membuat peneliti terus mencari fakta yang lebih. Kesulitan tentu juga dirasakan oleh peneliti mulai dari memperoleh informasi, menunggu informasi selesai berjualan, menunggu informan dari dinas pasar yang sedang bertugas, pedagang yang tidak mau diwawancara karena sibuk berjualan, dan tidak mau didokumentasi (difoto saat wawancara).

b. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dengan bertatap muka agar mendapatkan informasi lengkap tentang topik yang diteliti. Teknik wawancara ini digunakan karena dianggap mampu menggali semua informasi dari semua pihak yang penulis duga terlibat dalam permasalahan yang dihadapi PKL di Pasar Raya Kota Padang. Pada penelitian ini juga digunakan teknik wawancara

tertutup, karena wawancara dilakukan dalam kondisi subjek tidak mengetahui bahwa sedang dilakukan wawancara untuk mengetahui keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang.

Wawancara dilakukan dengan PKL di Pasar Raya Kota Padang pada waktu pagi, siang, sore hingga menjelang malam hari disaat sedang melakukan aktivitas berdagang, peneliti melakukan pendekatan terhadap pedagang dengan cara mengadakan transaksi membeli dagangannya. Wawancara juga dilakukan dengan pihak dari Dinas Pasar Kota Padang.

Awalnya peneliti membeli barang dagangan mereka, setelah membeli peneliti mulai bertanya disela-sela melakukan jual beli, barulah pedagang mulai bercerita mengenai alasan mereka mempertahankan keberadaannya di Pasar Raya Kota Padang. Pada saat inilah peneliti dapat berkomunikasi dengan baik. Namun, dalam komunikasi tersebut peneliti juga mendapat kesulitan karena wawancara dilakukan disela-sela mereka berdagang, sehingga data yang diperoleh tidak begitu banyak. Untuk mendapat informasi lebih lanjut, peneliti melanjutkan wawancara pada keesokan harinya.

Peneliti mulai melakukan wawancara pada pagi hari pukul 10.00 WIB di Dinas Pasar Kota Padang, terutama dengan petugas yang terkait masalah PKL dalam mempertahankan keberadaannya di Pasar Raya Kota Padang. Pada pukul 15.00 WIB, di lanjutkan langsung ke para PKL untuk diwawancara. Wawancara dengan para

pedagang tidak hanya dilakukan pada siang dan sore hari saja tetapi menjelang malam hari karena pada waktu itu para pembeli sudah sepi dan para waktu tersebut sudah bersiap-siap untuk pulang dan menyimpan barang dagangannya. Pada waktu ini dilakukan penelitian karena dianggap tidak mengganggu pedagang berjualan, banyak juga para pedagang diwawancara pada waktu tertentu karena mereka tidak mau diganggu dan takut barang mereka tidak laku.

Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yaitu terkait pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan catatan lapangan, dan untuk melengkapi informasi, peneliti juga melakukan studi dokumentasi di kantor Dinas Pasar Kota Padang dan ditambah dengan foto-foto pada saat wawancara dengan para PKL.

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Studi pustaka dan dokumentasi ini peneliti lakukan sebagai data sekunder dalam penelitian dengan cara mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut bisa berupa visual dan audio visual, baik dari pustaka, internet, majalah maupun koran yang berhubungan dengan pedagang kaki lima.

5. Triangulasi Data

Pengujian keabsahan data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan data lain sebagai data pembanding. Hal tersebut dilakukan dengan cara triangulasi sumber berupa pertanyaan yang diajukan kepada berbagai sumber (informan) baik PKL, dan Dinas Pasar Raya Kota Padang.

Triangulasi juga dilakukan dengan cara triangulasi waktu. Penelitian tidak hanya dilakukan dalam satu waktu saja tapi dilakukan secara berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Kemudian, triangulasi juga dilakukan dengan cara triangulasi teknik yaitu terhadap teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Apabila dengan ketiga teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar¹⁷.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang relatif sama kepada informan yang berbeda yang bertujuan untuk mendapatkan data secara akurat.

Begitu juga dengan observasi dan dokumentasi dilakukan secara berulang-ulang untuk melengkapi dan mencocokkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga mendapatkan ketepatan

¹⁷ Matthew B. Miles. A. Micahel Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta : UI Press. Hal 16-20

informasi dari hasil penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teknik *Interaktif Analysis* yang terdiri dari tiga tahap yakni *reduksi data*, *display data* dan *verifikasi*. Tujuan dipakainya analisis ini adalah untuk mendapatkan kesinambungan dan kedalaman dalam memperoleh data.

Cara analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data terjadi secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Setiap mengumpulkan data, data ditulis dengan rapi, terinci dan sistematis kemudian dibaca, dipelajari dan dipahami agar data-data yang didapat bisa dimengerti. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan yaitu memilih hal-hal yang penting sehingga sesuai dengan rumusan masalah.

Reduksi data yang sudah terkumpul mengenai alasan PKL tetap mempertahankan keberadaan mereka ditengah permasalahan yang

mereka hadapi di Pasar Raya Kota Padang, setelah itu jawaban yang sama dari informan dikelompokkan sehingga nampak perbedaan-perbedaan informasi yang didapat dari lapangan. Jika data yang didapatkan belum lengkap maka akan dilakukan wawancara ulang dengan informan.

b. *Display* data atau penyajian data

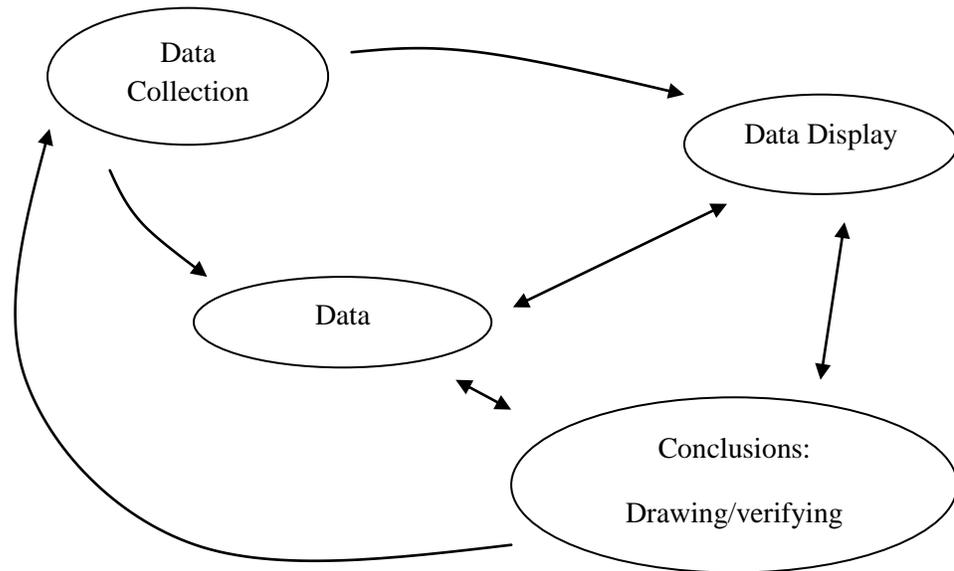
Display data merupakan proses penyajian data ke dalam bentuk tulisan dan tabel, dengan melakukan *display* data dapat memberikan gambaran secara menyeluruh sehingga memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan dan analisis. Pada tahap *display* data ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Agar didapatkan data-data yang lebih akurat, data-data dikelompokkan ke dalam tabel, tabel akan membantu peneliti dalam penarikan kesimpulan (verifikasi). Data yang diperoleh melalui wawancara dengan PKL, Satpol PP dan Dinas Pasar Raya Kota Padang disimpulkan dan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Mengecek kembali penulisan dan melakukan tinjauan kembali pada catatan lapangan mengenai alasan PKL tetap mempertahankan

keberadaan mereka di tengah permasalahan yang mereka hadapi di Pasar Raya Kota Padang. Data yang diperoleh disimpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang mudah dimengerti¹⁸.

Langkah-langkah di atas merupakan salah satu proses siklus interaktif. Peneliti bergerak di antara empat “sumbu” kumparan itu selain mengumpulkan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles & Huberman menjelaskan uraian tersebut pada skema Model Interaktif Analysis Miles dan Huberman seperti di bawah ini:



Gambar 1: Skema Model Interaktif Analysis Miles dan Huberman¹⁹

¹⁸ Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 91-92.

¹⁹ Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 91-92.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pasar Raya Kota Padang

1. Sejarah Berdirinya Pasar Raya Kota Padang

Setelah ditemukan tambang batu bara di Ombilin dan dibukanya jalan kereta api dari Sawahlunto ke Padang pada permulaan abad ke XIX, perkembangan kegiatan Kota Padang semakin pesat. Dengan adanya Sungai Batang Harau yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan, para pedagang dari luar negeri berdatangan ke sungai batang harau. Maka dibukalah tambang batu bara Ombilin serta dibuka pula jalan kereta api tersebut, dan dibangunlah Pelabuhan Teluk Bayur yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kapal dalam pengangkutan batu bara .

Kota Padang semakin bertambah ramai oleh para pedagang dalam melakukan usaha dibidang perdagangan, dengan adanya barang-barang ekspor impor melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Bertambahnya kesibukan melaksanakan ekspor barang-barang komoditi, menyebabkan timbulnya keinginan dan ide-ide dari orang-orang kota Padang untuk mendirikan pasar di daerah Kota Padang. Para pedagang yang bermodal semangat dan keinginan yang besar maka dibukalah pasar yang pertama yang didirikan di Kota Padang yang bernama Pasar Mudiek, adanya pasar mudiek tersebut yang

didirikan oleh orang-orang dari Kota Padang sehingga orang Tiong Hoa berkeinginan untuk mendirikan pasar, tapi kemudian pasar tersebut terbakar.

Penduduk kota Padang pada waktu itu terdiri dari 4 suku yaitu (1) Belanda totok, (2) Tiong Hoa, Arab dan Kelling, (3) Indo, (4) Bumi putra (putra asli Kota Padang).

Salah seorang penduduk kota Padang yang terkaya pada masa itu bernama Leasy Tiong Hoa diangkat oleh Belanda sebagai ketua toko Cina dengan pangkat Mayor, beliau ikut juga mendirikan pasar di daerah klinteng di Jalan Niaga yaitu Pasar tanah kongsi tetapi pasar itu tidak bertahan lama karena terbakar maka pasar itu dijual lagi kepada seorang Famili dari Leasy yang bernama Roan Hoat, Penjualan Pasar tersebut pada akhir abad ke-19 sejak adanya Pasar Mudiek dan pasar yang didirikan oleh orang Tiong Hoa menjadi mundur. Kemudian dalam abad ke-19 itu mengambil alih Pasar Jawa tersebut dan menggantikannya dengan pedagang pribumi. Pedagang pribumi sangat tersiksa oleh pajak yang terlalu tinggi, sebab diberi nama Pasar Jawa kerana mayoritas penduduk terdiri dari orang-orang Jawa yang datang kemari karena perang Dipenogoro dan dibawa oleh tentara Belanda.

Pasar pada abad ke XX mempunyai tonggak dari kayu dan atap seng, karena faktor tersebutlah yang menyebabkan pasar dikuasai oleh orang-orang Tiong Hoa, sedangkan penduduk asli pindah ke pedalaman. Akhirnya pada waktu itu keadaan di pasar para pedagang tersebut kembali lagi berdagang di Pasar Jawa sehingga para pedagang ramai kembali pada tahun 1963 didirikan

maket pasar fase I yang dikepalai oleh Walikota Madya Padang yaitu Zainuddin kembali pasar ditambah lagi menjadi beberapa pasar yaitu fase I,II, III IV, V , VI dan fase VII²⁰.

2. Gambaran Umum Pasar Raya Kota Padang

Pasar Raya Kota Padang merupakan pusat aktifitas ekonomi terbesar di Kota padang. Semua kegiatan ekonomi masyarakat berpusat di pasar ini, selain itu Pasar Raya Kota Padang menyediakan segala macam bentuk barang serta kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga Pasar Raya Kota Padang menjadi begitu ramai setiap harinya. Apalagi hampir semua angkutan umum dari berbagai penjuru Kota Padang menuju dan melewati kawasan ini.

Pasar Raya Kota Padang juga merupakan pusat yang membawahi pasar-pasar pembantu yang ada di Kota Padang, seperti Pasar Ulak Karang, Pasar Alai, Pasar Simpang Haru, Pasar Tanah Kongsi, Pasar Lubuk Buaya, dan lain-lain. Pasar Raya Kota Padang mempunyai suplay barang yang jauh lebih dibandingkan dengan pasar yang lainnya, baik dalam hal penyediaan barang-barang komoditi untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier lainnya.

Kawasan Pasar Raya Kota Padang terletak di lokasi yang sangat strategis di pusat Kota Padang yang dikelilingi oleh perkantoran, pertokoan, swalayan, taman kota, dan lain-lain.

²⁰ Data dari Dinas Pasar

Kawasan Pasar Raya Kota Padang berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan pertokoan Pasar Baru dan Bioskop Raya.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Wali Kota Padang dan Pertokoan M. Yamin.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Baru dan Kampung Jawa Dalam.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Benteng dan Pertokoan Adabiyah.

Setiap harinya Pasar Raya Kota Padang sangat ramai dikunjungi oleh para konsumen, baik yang akan membeli ataupun yang hanya sekedar jalan-jalan atau melihat saja. Apalagi pada hari-hari libur atau menjelang momen-momen tertentu. Pasar Raya Kota Padang menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai tempat untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan yang mereka perlukan.

3. Pengelolaan Pasar Raya Kota Padang

Berdasarkan Perda No. 17 tahun 1984, Pasar Raya Kota Padang merupakan suatu kawasan otonom oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Padang yang secara administratif dikelola oleh dinas pasar. Dinas Pasar yang mengelola Pasar Raya Kota Padang dibentuk oleh dan berada di bawah Wali Kota Padang, serta merupakan sub-bidang dalam kantor pemerintahan daerah.

Dinas Pasar memiliki tugas, fungsi serta wewenang di Pasar yang meliputi :

a) Tugas Pokok Dinas Pasar

Dinas Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar dan kawasan pasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi Dinas Pasar

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana di atas, Dinas Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengelolaan pasar, meliputi perencanaan, perumusan kebijaksanaan daerah serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- 2) Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan pengelolaan pasar.
- 3) Memberikan informasi mengenai situasi pasar, saran serta pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan.
- 4) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di kawasan pasar.

- 5) Mempertanggungjawabkan tugas-tugas dinas, baik teknis di lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memelihara dan meningkatkan kemampuan/prestasi pegawai dinas serta disiplin pegawai.
- 7) Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi/lembaga, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

c) Wewenang Dinas Pasar

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada fungsi diatas, Dinas Pasar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menghimpun, mengumpulkan, meneliti dan menata pemanfaatan lahan di kawasan pasar serta mengolah data-data tentang kegiatan pedagang dan pengusaha jasa dalam hubungannya dengan penyediaan fasilitas tempat berjualan di kawasan pasar.
- 2) Mempersiapkan, merencanakan, merumuskan kebijakan teknis dan mengatur fasilitas yang bersangkutan dengan pengelolaan, pemberian pelayanan dan jasa kepada masyarakat di kawasan pasar.
- 3) Merencanakan, mengembangkan, manata sarana dan prasarana, serta menata kawasan pasar.

- 4) Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap para pedagang dibidang peningkatan usaha dagang.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengelola perlistrikan dilingkungan pasar.
- 6) Melakukan pungutan retribusi, bea harian pasar dan lainnya atas pemanfaatan fasilitas pasar.
- 7) Membuat pembukuan keuangan retribusi, bea harian pasar dan pendapatan lainnya serta menyetorkannya ke kas daerah.
- 8) Melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dan bea harian pasar.
- 9) Melakukan pengamanan, kebersihan dan menciptakan ketertiban di kawasan pasar.
- 10) Melakukan ikatan kerjasama dalam memanfaatkan fasilitas pasar.
- 11) Membuat draft peraturan terhadap semua pungutan yang diberlakukan di kawasan pasar.
- 12) Mengupayakan penyelesaian pertikaian/perselisihan antara pedagang dan atau pengusaha jasa dalam menjalankan usaha dilingkungan pasar.
- 13) Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang K3 dalam lingkungan pasar dan kawasan pasar.

14) Melakukan pengawasan terhadap Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban (K-3), toko, kios, los, jalan, gang, taman di kawasan pasar.

d) Kebijakan Dinas Pasar Kota Padang Terhadap Pedagang Kaki Lima

Untuk menciptakan dan mewujudkan Kota Padang yang indah, rapi serta tertib dari berbagai macam permasalahan yang timbul akibat adanya PKL, maka penertiban harus dilakukan. Selain itu, kebijakan penertiban juga dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, jadi tindakan tersebut tidak hanya sebatas peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah, peraturan kepala daerah ataupun produk hukum lainnya.

Dinas Pasar merupakan instansi yang berwenang untuk mengelola dan menata pasar. Mengenai tugas dan fungsi dinas pasar dapat dijelaskan bahwa dinas pasar merupakan perangkat daerah yang diberi kewenangan mengelola Pasar Raya dan Pasar Pembantu yang ada di Kota Padang agar dapat menciptakan pasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman untuk mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di wilayah Sumatera Barat.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Dinas Pasar memiliki beberapa misi yaitu :

1. Merumuskan penataan kawasan pasar.
2. Menciptakan kawasan pasar yang aman, tertib, bersih, dan nyaman yang bernuansa rekreasi.
3. Mewujudkan pelayanan prima kepada pedagang maupun pengunjung pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Mewujudkan revitalitas pasar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (investor).
5. Meningkatkan prasarana pasar sesuai konsep penataan kawasan pasar.

Misi yang dimiliki oleh dinas pasar tentu tidak hanya sebatas omongan belaka, oleh karena itu dinas pasar merealisasikannya dalam membuat aturan untuk penataan pedagang di Pasar Raya yang termasuk didalamnya adalah aturan untuk PKL dalam bentuk Edaran yang berbunyi :

“Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Walikota Padang No. 33 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Pengaturan PKL di Kota Padang, pasca dibongkarnya Kios Darurat di sepanjang jalan pasar raya, demi lancarnya arus lalu lintas dan tersedianya lokasi parkir yang kondusif, bersama ini disampaikan kepada seluruh PKL jalan Pasar Raya sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menggelar barang dagangannya melewati garis batas yang telah ditentukan.
2. PKL mulai menggelar barang dagangannya dari pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Setelah berjualan tidak dibenarkan meninggalkan barang dagangan, lapak-lapak, meja, kursi, terpal

- pada jalan, trotoar, selasar (teras) toko dan gang-gang pertokoan.
4. Lahan parkir diperuntukkan untuk parkir kendaraan, tidak boleh dialihkan fungsikan untuk PKL sebelum pukul 17.30 WIB.
 5. Untuk lokasi parkir bendi ditempatkan di jalan Sandang Pangan dan tidak dibenarkan di jalan Pasar Raya.
 6. Apabila poin satu 1 sampai 4 tidak diindahkan maka bagi pedagang akan dilakukan penyitaan barang dagangannya dan untuk juru parkir dibatalkan kontrak kerjanya melalui dinas perhubungan.

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, sebelumnya diucapkan terima kasih”.

Dengan adanya aturan mengenai PKL di Pasar Raya Kota Padang, diharapkan PKL mampu menyesuaikan diri. Namun pada realitasnya yang terjadi adalah PKL tidak menghiraukan aturan yang telah diedarkan oleh Dinas Pasar, mereka seolah tidak peduli dengan aturan yang mereka anggap tidak adil bagi mereka (PKL).

Dinas Pasar memiliki beberapa langkah dalam menertibkan PKL yang membandel di Pasar yakni (1) Memberikan Himbauan, (2) Memberikan Peringatan, (3) Melakukan Pemanggilan terhadap Pelanggar, (4) Dilakukan sidang *Tipiring* (tindak pidana ringan), (5) Membayar Denda²¹.

Pedagang kaki lima selalu menumbuhkan babak baru dalam setiap himbauan, peringatan bahkan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pasar yang mengikutsertakan Satpol PP Kota Padang. Bahkan

²¹ Sumber dari Dinas Pasar

tidak sedikit dari PKL yang dikenakan *Tipiring* atau tindak pidana ringan atas pelanggaran yang dilakukan saat terjadi penertiban, setiap pelanggar Perda selalu dikenakan *Tipiring*, namun selain itu Dinas Pasar juga melakukan pembinaan terhadap PKL.

B. Lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang

Pasar Raya Kota Padang merupakan kawasan perdagangan yang setiap harinya selalu ramai. Keramaian tersebut disebabkan karena banyaknya pedagang yang memanfaatkan tempat ini untuk berdagang dalam bentuk pedagang kaki lima. Selain harga yang ditawarkan oleh pedagang cukup rendah, ditempat ini juga dijual berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima di lokasi ini merupakan alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja di Pasar Raya Kota Padang.

Pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Padang pada umumnya sudah lama berdagang di Pasar Raya, hanya saja posisi mereka yang sering berpindah-pindah. Posisi tersebut sesuai dengan tingkat strategis yang mereka anggap sebagai tempat yang mudah dijangkau oleh para pembeli. Semakin lama jumlah PKL di Pasar Raya semakin bertambah, sehingga keberadaan mereka kemudian justru menimbulkan permasalahan karena telah memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang (seperti trotoar dan lahan parkir).

Pada awalnya para pedagang kaki lima merupakan pedagang biasa yang memanfaatkan areal pasar untuk berdagang, dan tidak diatur secara langsung oleh

pemerintah. Lama-kelamaan jumlah pedagang kaki lima bertambah banyak, sehingga diperlukan aturan dari pemerintah yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur para pedagang kaki lima.

Pertumbuhan PKL yang cepat serta areal yang tersedia terbatas, mengakibatkan pemerintah sangat berperan dalam pengelolaan pasar. Pengelolaan terhadap PKL diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ditimbulkan akibat keberadaan mereka, terutama sebagai upaya untuk menciptakan Kota atau Pasar yang teratur. Tempat atau lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam berdagang, karena tempat sangat menentukan banyak atau sedikitnya jumlah pembeli yang akan berbelanja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pedagang kaki lima seringkali dilihat dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan. Dalam menghadapi PKL dengan bidang penataan kota misalnya, Pemerintah Kota seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi mereka. Hal ini bisa terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan PKL. Padahal PKL harus juga dipandang dari segi positif, PKL dapat menyerap angkatan kerja, retribusi yang dipungut dari PKL dapat membantu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, dan PKL dapat membuka lapangan kerja sendiri. Selain itu PKL juga ikut serta membantu sistem ekonomi perkotaan dalam hal menciptakan rantai-rantai kegiatan ekonomi perkotaan.
2. Keberadaan PKL yang sering menuai Pro dan Kontra di dalam masyarakat, mengakibatkan banyak pihak yang turut campur dalam penanganan masalah tersebut. Mulai dari pembelaan elit-elit politik

terhadap hak-hak PKL yang harus mereka peroleh dari Pemerintah Daerah, sampai kepada campur tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah memperjualbelikan lahan parkir atau badan jalan kepada PKL sebagai tempat berdagang tanpa seizin dari Dinas Pasar.

3. Dalam mempertahankan keberadaannya, PKL bukan tidak memiliki alasan.

Faktor penyebab PKL mempertahankan keberadaannya di Pasar Raya Kota Padang adalah (1) Ada Oknum yang Sengaja Memanfaatkan Keberadaan PKL; (2) Persepsi PKL terhadap Beo yang Mereka Bayar Setiap Hari kepada Dinas Pasar; (3) Keterlibatan dan Dukungan Partai Politi; (4) Adanya Relokasi yang Tidak Dikehendaki PKL; (5) Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai PKL yang Tidak Berpihak.

B. Saran

Setelah melihat permasalahan yang terjadi dilapangan, tentang keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang, maka peneliti menyarankan:

1. Pedagang kaki lima sebagai kelompok usaha kecil yang menempati kawasan Bundaran Air Mancur sampai ke arah jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia) seharusnya memberikan toleransi kepada pemilik toko yang berada dibelakang lapak mereka. Karena pemilik toko yang berada dibelakang lapak mereka memiliki hak yang lebih besar dalam berdagang dengan membayar sewa toko dan sudah memiliki izin usaha yang resmi. Jangan sampai dengan keberadaan PKL di depan toko

mereka justru akan membuat pemilik toko dirugikan yang diakibatkan jalan menuju toko tersebut terhalang oleh lapak PKL.

2. Komunikasi antara Pemerintah dengan PKL harus bisa terjalin dengan baik, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh PKL. Begitu pula sebaliknya, Pemerintah juga dapat mendengarkan aspirasi dari PKL sehingga dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan harapan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Labor Sosiologi. FISIP UNAND
- Alisjahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta; Penerbit Kencana Prenada Media
- Manning, Chris & Tajjudin, Noer Efendi. 1987. *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di kota*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Matthew B. Miles. A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Mustafa, Ali. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. Malang: Inspire Indonesia
- Putri, Rahayu Selvi. 2009. Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban oleh Satpol PP (studi: Pedagang Kaki Lima di Pasar raya Barat Padang). *Skripsi jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas*.
- Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Terj. Budi Kusworo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Surat Edaran dari Walikota Padang Mengenai Perwako No. 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Pengaturan PKL
- Yustika, Erani Ahmad. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Perda-tentang-peraturan-pasar-masih-belum-optimal-529307.html diakses pada tanggal 28 februari 2013
- <http://www.gugustugastrafficking.org> diakses pada tanggal 2 februari 2013
- <http://www.DefinisiPerdagangandanJenisPedagang.html> diakses pada tanggal 12 desember 2012